**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2019
(Studi Kasus Pada Desa Landonno 2 Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan)**

Satira Yusuf¹, La Ode Anto², Made Yoga Hapsara³

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
Sulawesi Tenggara**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Landonno 2 Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer yang berisikan wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat di Desa Landonno 2.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Landonno 2 untuk tingkat akuntabilitas dan transparansi masih belum cukup baik, dimana pada pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa tidak informatif mengenai hasil pelaksanaan program Dana Desa. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa tidak memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Pemerintah desa masih belum cukup baik dalam mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Landonno 2 harus lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses Pengelolaan Dana Desa sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the level of Accountability and Transparency of Village Fund Management in Landonno 2 Village, Landonno District, Konawe Selatan Regency, starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. The data analysis technique used a qualitative descriptive analysis technique. Data collection methods in this study are documentation and interviews. The data used is primary data which contains interviews with the village government and the community in Landonno Village 2.

The results of this study indicate that the management of village funds in Desa Landonno 2 for the level of accountability and transparency is still not good enough, where the implementation of Village Fund Management does not involve community participation.

The Village Government is not informative about the results of the implementation of the Village Fund program. The reporting and accountability stages of the Village Government do not provide information about the use of Village Funds to the community. The village government is still not good enough at archiving documents related to Village Fund Management. The Landon 2 Village Government must further increase accountability and transparency in the Village Fund Management process so that village development can run optimally.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Management*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis.

Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat saat ini sangatlah besar dan selalu bertambah tiap tahunnya. Besaran Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Anggaran	Rata-Rata Perdesa
2015	Rp 20.700.000.000.000	Rp 280.000.000
2016	Rp 46.980.000.000.000	Rp 626.000.000
2017	Rp 50.000.000.000.000	Rp 667.000.000
2018	Rp 60.000.000.000.000	Rp 800.000.000
2019	Rp 70.000.000.000.000	Rp 933.000.000
2020	Rp 72.000.000.000.000	Rp 960.000.000

Sumber: *kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020 (Diolah).*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus bertambah besar, dimana pada tahun 2015 dana desa yang diberikan sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 naik menjadi 46.9 triliun, tahun 2017 naik menjadi Rp 50 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp 60 triliun, tahun 2019 naik menjadi 70 triliun, dan tahun 2020 naik menjadi 72 triliun. Dengan adanya dana desa yang besar ini tentunya akan mengakibatkan tanggungjawab pemerintah desa bertambah besar, dan juga dengan adanya dana desa yang besar ini dapat meningkatkan peluang terjadinya tindak kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa semakin besar. Oleh karna itu dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 dimana dalam peraturan tersebut mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada penduduk desa di Desa landono 2 didapatkan bahwa masih banyak warga yang belum mengetahui program-program yang dilakukan oleh kepala desa dan besaran dana yang dipakai dalam program-program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi kasus pada desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan)**”

II. LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan peroses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Desa

a. Pengertian desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pemerintahan Desa

Menurut C.F Strong Pemerintahan atau *Government* adalah organisasi dalam mana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

c. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan mausia didasarkan pada ruang dimensi sosial (Indeks Katahanan Sosial-IKS), dimensi ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi-IKE), dan dimensi ekologi (Indeks Ketahanan Lingkungan-IKL). IKS terdiri dari dimensi: modal social, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. IKE terdiri dari dimensi ekonomi. Sedangkan IKL terdiri dari dimensi ekologi.

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan Dana Desa

Pemerintah dan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu: Meningkatkan pelayanan publik didesa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

c. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya: Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri

dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal. Dan Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Akuntabilitas

a. Konsep Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:3) Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu : Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 25 Nomor 71 tahun 2010, menjelaskan bahwa transparan adalah memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundangundangan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa dan masyarakat di desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan adapun informan uji dari penelitian ini yaitu pemerintah desa landono 2 yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau penjelasan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan apakah penerapan Akuntabilitas dan Transparansi di desa Landono 2 sudah sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri No 20 tahun 2018.
2. Data Kuantitatif, Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan dan pengukuran. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke desa Landon 2 pada tahun 2019.

Sumber Data

1. Data Primer, Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Landono 2 Kecamatan Landono kabupaten Konawe Selatan.
2. Data Sekunder, Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Landono 2 Kecamatan Landono Kaupaten Konawe Selatan. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan desa, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasika seperti dokumen, data *soft file*, data otentik foto dan

arsip lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

2. Wawancara, Interview atau wawancara dilakukan langsung dengan kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di desa Landono 2 Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisa data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Aktivitas dalam analisa data yaitu : data reduction, display, dan conclusion drawing/verification, dengan penjelasannya yaitu :

1. Data *Reduction*, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Data *Display*, Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. *Conclusion drawing/verification*, Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Pengelolaan Dana Desa

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa landono 2 awalnya memanggil Pak RT, Pak RW dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah terkait dengan pengelolaan Dana Desa, kemudian setelah adanya kesepakatan pemerintah desa membuat APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Landono 2 :pada tanggal 16 Januari 2021 :

“Pada tahap perencanaan itu awalnya kita panggil perangkat desa, Pak RT, Pak RW serta masyarakat yang tidak memiliki kesibukan untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan dana desa, setelah itu kita melakukan musyawarah terus penyusunan RKP, trus kita masukan ke APBdes.”

Dalam tahap perencanaan ini pemerintah desa landono 2 sudah melaksanakan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimana pemerintah desa sudah melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara memanggil masyarakat Desa Landono untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah terkait perencanaan pengelolaan keuangan desa. Untuk partisipasi masyarakatnya sudah banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Landono 2 pada tanggal 16 Januari 2020 :

“Untuk partisipasi masyarakat itu sudah sangat baik yaitu pada saat kami panggil untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan dana desa itu sudah banyak masyarakat yang datang dan ikut memberikan masukan.”

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Landono 2 Pada tanggal 18 Januari 2020 (Informan 1 dan informan 2) mengungkapkan bahwa :

“Pada proses perencanaan itu, kami sebagai masyarakat disini selalu diberikan ruang ya untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan dana desa itu.”

“Tingkat Partisipasi Masyarakat saya rasa sudah sangat besar.”

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, maka pemerintah desa kemudian membuat Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang kemudian dari RKPDes ini dibuatlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa (APBDes). Adapun APBdes yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Landono 2 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Landono 2
Tahun Anggaran 2019

Uraian	anggaran	semer dana
Pendapatan		
Pendapatan Transfer	919.514.000,00	
Jumlah Pendapatan	919.514.000,00	
Belanja		
<u>Bidang Penyelenggaraan Desa</u>	<u>170.600.000,00</u>	
Penyelenggaraan Belanja siltap, Tunjangan, dan oprasional pemerintah Desa		
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa (Belanja Pegawai)	42.000.000,00	
Penyediaan penghasilan tetap dan dan tunjangan perangkat desa (Belanja Pegawai)	66.000.000,00	
Penyediaan oprasional pemerintah desa	15.000.000,00	
Penyediaan tunjangan BPD	18.600.000,00	
Penyediaan oprasional BPD	5.000.000,00	
Penyediaan insentif/oprasional RT/RW	24.000.000,00	
<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</u>	<u>693.342.000,00</u>	
Sub Bidang Pendidikan	18.000.000,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa non formal milik desa	12.000.000,00	
Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat	6.000.000,00	
Sub Bidang Kesehatan	34.800.000,00	
Penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls Bumil,lamsia,insentif)	19.800.000,00	
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengadaan sarana prasarana posyandu	15.000.000,00	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.000.000,00	
Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa	35.000.000,00	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	605.542.000,00	
Dukungan pelaksanaan program pembangunan/	129.293.000,00	

rehab rumah tidak layak huni GAKIN		
Pembuatan/pemeliharaan sanitasi pemukiman (Gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan)	476.249.000,00	
<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>43.572.000,00</u>	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	
Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes	7.200.000,00	
Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	14.372.000,00	
Penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan	3.000.000,00	
Perayaan hari kemerdekaan RI	5.372.000,00	
Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan	2.500.000,00	
Perayaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kabupaten	3.500.000,00	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan /olahraga tingkat desa	4.000.000,00	
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000,00	
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	
Pembinaan PKK	12.000.000,00	
<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>12.000.000,00</u>	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.903.000,00	
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.903.000,00	
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.097.000,00	
Lain-lain kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal	2.097.000,00	
Jumlah Belanja	919.514.000,00	

Sumber : data Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 (Data Diolah)

Tabel 4.3 menunjukan bahwa jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Desa Landono 2 adalah sebesar Rp 919.514.000,00, dimana pengalokasian dana oleh pemerintah Desa Landono 2 diperuntukan untuk 4 bidang kegiatan

yaitu, yang pertama bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang menggunakan dana sebesar Rp 170.600.000,00, Bidang kedua yaitu Pembangunan Desa yang menggunakan dana sebesar Rp 693.342.000,00, Bidang ketiga yaitu Pembinaan Kemasyarakatan yang menggunakan dana sebesar Rp 43.572.000,00, dan yang keempat yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menggunakan dana sebesar Rp 12.000.000,00.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Keuangan (TPK) yang ada di Desa Landono 2. Tugas kepala Desa pada tahap pelaksanaan ini hanyalah memonitor pelaksanaan kegiatan saja dan tidak turun langsung ke lapangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Landono 2 Pada tanggal 16 Januari 2021 :

“Untuk proses pelaksanaan kegiatan itu kan awalnya kita melakukan MUSdes musyawarah desa dan kemudian kita jaring usulan-usulan dari masyarakat setelah itu kita membuat RKP, kemudian baru kita musyawarah musrembang lagi terkait penetapan APBdes. Usulan-usulan yang ditetapkan di RKP Rencana Kegiatan Pemerintah desa RKPdes namanya setelah ditetapkan itu baru kita masukan ke APBdes. Nah setelah ada APBdes ini baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya yang telah masuk ke APBdes. untuk kegiatan dilapangannya itu kita membentuk tim TPK tim pengelola keuangan namanya. Kalau kepala desa kan cuma memonitor tidak terlibat langsung dalam kegiatannya kalau dilapangan TPK yang mengelolah.” jika terlalu banyak yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kegiatan maka bisa-bisa kegiatan tersebut tidak berjalan lancar.”

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan masyarakat Desa Landono 2 (Informan 1 dan 3) pada Tanggal 18 Januari 2021 :

“Kalau pada saat pelaksanaan kegiatan itu ya saya rasa tidak ada panggilan dari kepala desa untuk ikut berpartisipasi, seandainya ada panggilan pasti saya langsung ikut untuk berpartisipasi.” (Informan 1)

“Saya rasa pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, masyarakat kurang diibatkan ya karna dari beberapa masyarakat disini yang saya kenal tidak ada yang ikut berpartisipasi kecuali aparaturnya.” (Informan 3)

3. Tahap Penatausahaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pemerintah desa selalu mencatat setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan penerimaan (Pendapatan), dan pengeluaran (belanja), yang kemudian dicatat dan dimasukkan ke laporan keuangan pada tahun yang bersangkutan. Adapun aplikasi yang digunakan pemerintah desa dalam melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi yaitu aplikasi Microsoft Exel. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 pada tanggal 18 Januari 2021 :

“iya, untuk penerimaan dan pengeluaran dana desa itu semua kita catat kemudian kita buat laporan keuangannya.”

“Iya ada. Dalam penatausahaan kita menggunakan aplikasi Microsoft Exel.”

4. Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APB Desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Kepala Desa Landono 2 awalnya membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang kemudian pemerintah desa melaporkannya ke kabupaten DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa), termasuk juga melaporkannya ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Landono 2 pada tanggal 16 Januari 2021 :

“Bentuk pertanggungjawabannya itu pelaporannya secara tertulis dalam bentuk LPJ setiap tahap kita buat LPJ tahap pertama keluar dana kita gunakan kemudian kita buat pertanggungjawaban setiap saat setiap keluar dana itu kita buat pertanggungjawaban. Kemudian kita melaporkannya ke kabupaten DPMD diinspektorat, termasuk juga laporan itu ke BPD kita melaporkan hasil kegiatan desa.”

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ini pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang berada di balai desa dengan cara menempelkan LPJ tersebut pada papan pengumuman. Bisa juga jika ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai LPJ secara

langsung maka masyarakat tersebut dapat datang langsung menemui kepala desa dan menanyakannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Landono 2 pada tanggal 16 Januari 2021 :

“ya, terkait laporan pertanggungjawaban itu kita juga menginformasikan kepada masyarakat biasanya kita menempelkan laporan pertanggungjawaban itu pada papan pengumuman yang ada di balai desa, bisa juga seandainya ada masyarakat ada ingin mengetahui mengenai laporan pertanggungjawaban itu bisa datang ke saya nanti saya akan memberitahukannya.”

Namun dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Landono 2 didapatkan bahwa pemerintah desa sudah tidak lagi menempelkan Laporan Pertanggungjawabannya ke papan pengumuman yang berada di balai desa. hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Landono 2 Pada Tanggal 18 Januari 2021 :

“Untuk laporan penggunaan dana itu memang pernah ada diinformasikan di papan pengumuman tapi itu dulu kalau sekarang sudah sudah jarang ya di tempelkan di papan pengumuman itu.”

Untuk Kelengkapan data pada proses Pengelolaan Dana Desa di Desa Landono 2 ada laporan-laporan yang ternyata hilang yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 semua laporan-laporan tersebut hilang yaitu laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes), Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan LPJ. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Landono 2 Pada tanggal 17 Februari 2021 :

“Kalau laporan RKPdes dengan APBDes itu ada, tapi kalau laporan pertanggungjawaban itu saya lupa dimana saya simpan.”

“Kalau 2018 itu saya lupa juga taruh dimana laporan-laporan itu, nanti saya cari-carikan lagi kalau ada nanti saya kasih tau.”

Dalam Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang telah disusun di APBdes ini pemerintah desa telah menjalankan semua program-program yang ada pada APBdes ini, akan tetapi ada salah satu program yang proses pelaksanaannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat proses perencanaan, yaitu program pembuatan selokan dimana pada saat musyawarah telah ditetapkan bahwa pembangunan selokan tersebut adalah sepanjang 800 meter akan tetapi pada pelaksanaannya pembuatan selokan tersebut tidak sampai 800

meter. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 17 Februari 2021 :

“Dari yang saya lihat sepertinya pemerintah desa telah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang telah kami musyawarahkan sebelumnya, tetapi ada yang saya lihat dari salah satu kegiatan yaitu pembuatan selokan dimana pengerjaannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.” (Informan 3)

”Kalau kegiatannya semuanya sudah dijalankan tetapi ada kegiatan yang tidak terselesaikan yaitu pembuatan parit.” (Informan 4)

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa ini, pemerintah Desa Landono 2 tidak memberitahukan kepada masyarakat jika ada program yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga pemerintah desa tidak memberitahukan mengapa kegiatan tersebut tidak terselesaikan . Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Landono 2 pada tanggal 17 Februari 2021 :

“sepertinya pemerintah desa tidak memberitahukan pada kami bahwa ada kegiatan yang tidak terselesaikan dan mengapa kegiatan tersebut tidak terselesaikan pemerintah desa tidak memberitahukannya.” (Informan3)

“Dari yang saya tau pemerintah desa tidak ada yang memberikan informasi mengenai pembuatan parit itu.” (Informan 4)

Pada Tahap pelaksanaan kegiatan ini juga pemerintah desa kurang melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Landono 2 pada tanggal 16 Januari 2021 :

“Kalau saat pelaksanaan kegiatan itu kita tidak terlalu melibatkan masyarakat karna

Pembahasan

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa Pada Desa Landono 2 Tahun 2019

1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa pemerintah desa telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan baik dimana pemerintah desa sudah memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan desa (Musrembang), yang kemudian dari hasil musrembang ini dibuatlah Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam hal ini pemerintah desa Landono 2 telah menjalankan proses perencanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan permendagri No 20 Tahun 2018 dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

2. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap pelaksanaan

Pada tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Landono 2 tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan hanya melibatkan partisipasi aparatur desa saja. Alasannya yaitu pemerintah desa landono 2 berfikir bahwa jika terlalu banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bisa jadi kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar. dan juga pada tahap pelaksanaan ini ada salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah desa ternyata tidak sesuai target yang telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Dengan adanya kegiatan yang tidak terselesaikan ini seharusnya pemerintah desa memberitahukan kepada masyarakat mengapa kegiatan tersebut tidak terselesaikan, akan tetapi pemerintah desa tidak memberitahukannya kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Desa Landono 2 melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan asas Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa yaitu dalam hal akuntabel dan partisipatif dimana pemerintah desa seharusnya melaporkan atau memberitahukan jika ada program kegiatan yang tidak terselesaikan dan juga seharusnya setiap penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. (Permendagri No 20 Tahun 2018)

3. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap penatausahaan

Pemerintah desa Landonon 2 dalam melakukan penatausahaan keuangan menggunakan aplikasi yang bernama Ms. Exel. Pemerintah desa landono 2 selalu mencatat setiap transaksi baik penerimaan maupu pengeluaran yang terjadi pada saat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Dalam hal ini pemerintah desa sudah

melaksanakan proses penatausahaan dengan sangat baik dimana pemerintah desa telah mencatat setiap transaksi yang terjadi.

4. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Landono 2 untuk pelaporan atas kinerjanya kepada pemerintah yang berada diatasnya (bupati/walikota/pihak yang berkepentingan) sudah sangat baik dimana proses pelaporannya sudah mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018. pemerintah desa sudah membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) yang dibuat setiap tahun yang kemudian pemerintah desa Landono 2 akan melaporkannya kepada kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD).

Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Landono 2 Tahun 2019

1. Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap perencanaan

Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan sudah melibatkan partisipasi masyarakat dimana pemerintah desa sudah memanggil masyarakat dan juga Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan dana desa di desa Landono 2. Dalam hal ini pemerintah desa Landono 2 sudah melaksanakan kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 dimana dalam peraturan tersebut mengharuskan agar perencanaan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pengelolaan Dana Desa Di Desa Landono 2 sudah sangat baik.

2. Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Landono 2 tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan hanya melibatkan partisipasi aparatur desa saja. Hal ini dikarenakan pemerintah desa landono 2 berfikir bahwa jika terlalu banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bisa jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yaitu dalam hal keterbukaan proses. yang dimaksud dari keterbukaan proses yaitu adanya keterbukaan proses perencanaan dan penyelenggaraan

kegiatan yang berhubungan dengan Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaksanaannya masih kurang baik.

3. Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Penatausahaan

Pemerintah desa Landono 2 dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana desa selalu mencatat setiap transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran. Setelah pemerintah mencatat setiap transaksi yang kemudian pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pelaporan kepada bupati atau pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa pada tahap penatausahaan dengan sangat baik karena pemerintah desa telah mencatat setiap transaksi yang terjadi.

4. Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Landono 2 untuk pelaporan atas kinerjanya kepada pemerintah yang berada di atasnya (bupati/walikota/pihak yang berkepentingan) sudah sangat baik dimana pelaporan pertanggungjawabannya sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Akan tetapi untuk pertanggungjawaban kepada masyarakatnya masih kurang baik karena pemerintah desa tidak memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat, dan juga untuk kelengkapan datanya masih sangat banyak laporan yang hilang yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes, Laporan Anggaran pendapatan dan Belanja desa APBDes, dan LPJ semuanya hilang. Dalam hal ini pemerintah desa telah melanggar prinsip-prinsip transparansi yaitu dalam hal keterbukaan proses dan kelengkapan data.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Landono 2 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat akuntabilitas pemerintah Desa Landono 2 kepada pemerintah desa yang berada di atasnya (bupati/walikota/pihak yang berkepentingan) sudah sangat baik dimana prosedur pelaporannya sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018. pemerintah Akan tetapi untuk tingkat Akuntabilitas pemerintah Desa Landono 2 kepada masyarakatnya masih kurang baik dimana pelaksanaan pengelolaan dana desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan juga pemerintah desa tidak informatif mengenai hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
2. Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa sudah cukup baik dimana pemerintah desa sudah menyediakan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Kejelasan datanya sudah baik dimana kejelasan data sudah sesuai fakta yang ada, dan keterbukaan proses pada tahap perencanaan sudah melibatkan partisipasi masyarakat, akan tetapi masih kurang di beberapa bagian dimana dalam menyampaikan informasi tentang pengelolaan dana desa pemerintah desa sudah tidak lagi menempelkan informasi pada papan pengumuman, kemudian untuk kelengkapan datanya masih banyak data-data yang hilang, dan untuk keterbukaan proses pelaksanaannya pemerintah desa tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa salah satu kegiatan pengerjaannya tidak sesuai target yang telah ditentukan.

Implikasi

1. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai pemerintahan desa Landono 2 agar lebih baik dalam melaksanakan pengelolaan dana desa
2. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat desa Landono 2 untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Dana desa

Keterbatasan

1. Tempat penelitian yang cukup jauh dari kota kendari
2. penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan peneliti diatas maka ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat Desa Landono 2 guna meningkatkan prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, yaitu :

1. Pihak pemerintah desa seharusnya selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa, dan juga pemerintah desa harus lebih informatif kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa harus lebih transparan di mana dalam penyampaian informasi mengenai laporan penggunaan dana harus terus ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di balai desa, bisa juga agar lebih mudah dalam menyampaikan informasi mengenai laporan penggunaan dana ini pemerintah desa bisa membuat situs web dimana dalam web tersebut berisikan informasi-informasi mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Landono 2. Pemerintah harus mengarsipkan dengan baik dokumen yang berhubungan dengan penggunaan dana desa. Dan dalam peroses pelaksanaan kegiatan pemerintah desa seharusnya memberitahukan kepada masyarakat jika ada kegiatan yang tidak terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- C.F Strong. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media. Bandung.

Data Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2020, Kementrian Keuangan Repoblik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-tahun-2015/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Menteri Keuangan, November 2017.

Kristianten. 2006. *Transparansi anggaran pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No 1, Mei 2006*.

Mardiasmo. 2010. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengalokasian Dana Desa*.

Mawitjere, Intania Nella. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*.

Nordiawan, Deddi. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Selemba Empat, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Prasetyo, Andhika. 2017. *Menata Ulang Alokasi Dana Desa*.

Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. 2018. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia*.

Sedarmayanti. 2004. *Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.

Setiawan, Made Wiradarma. 2017. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Bengkel Kecamatan Bungsubiu Kabupaten Buleleng)*.

Solihin Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, www.dpr.go.id

Wahyuddin. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana desa di desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *e-jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5*.

Wahyuni, Sri. 2019. *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)*